



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025



PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-911513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : A. SYAIFULLAH, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang



A. SYAIFULLAH, S.H.

NIP. 19590109 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang



EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

NIP. 19690928 199103 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100 %
5.	Meningkatnya transparansi administrasi keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyerapan anggaran	95 %
		Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95 %
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %
		Persentase penyelesaian tugas di bagian umum	100 %
6.	Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan organisasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi berbasis teknologi Informasi	Nilai akuntabilitas kinerja	87%
		Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi	100%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan SDM yang professional, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah ASN yang data kepegawaiannya terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	19
		Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	120
		Persentase kedisiplinan ASN	100 %
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN melalui Bimtek/Diklat	20
		Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%
		Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala	100%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.420.687.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	53.385.000,-

Pangkalpinang, 6 Januari 2025

Ketua,



EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.
NIP. 19690928 199103 1 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

